

ANALISIS POLITIK HUKUM PERMENDIKBUD NOMOR 34 TAHUN 2018 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN VOKASI DI INDONESIA

POLITICAL ANALYSIS OF THE LAW OF THE MINISTER OF EDUCATION AND CULTURE REGULATION NUMBER 34 OF 2018 AND ITS IMPLICATIONS FOR VOCATIONAL EDUCATION IN INDONESIA

Eka Suwirza ^{1*}

Ismaidar ²

Tamaulina Br. Sembiring ³

^{*1-3}Program Magister Ilmu Hukum,
Universitas Pembangunan Pancabudi

*email:ekasuwirza25@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dimensi politik hukum dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap latar belakang politik, tujuan, dan implikasi dari peraturan tersebut terhadap sistem pendidikan vokasi di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 merupakan refleksi dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa. Peraturan ini juga menunjukkan pergeseran paradigma dalam pendidikan vokasi, di mana dunia usaha dan industri memiliki peran yang lebih sentral. Namun, implementasi peraturan ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Implementasi peraturan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas guru, serta dinamika dunia kerja yang terus berubah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan transformasi pendidikan vokasi sangat bergantung pada komitmen dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat.

Kata Kunci:

Politik Hukum
Politik hukum Permendikbud nomor
34 Tahun 2018
Hukum

Keywords:

Legal Politics
Legal politics of Permendikbud number
34 of 2018
Law

Abstract

This study analyzes the legal political dimensions of the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 34 of 2018 concerning National Standards for Vocational High School Education/Vocational Madrasah Aliyah. This study aims to uncover the political background, objectives, and implications of the regulation on the vocational education system in Indonesia. Through a qualitative approach, this study found that Permendikbud Number 34 of 2018 is a reflection of the government's efforts to improve the quality of human resources and the nation's competitiveness. This regulation also shows a paradigm shift in vocational education, where the business world and industry have a more central role. However, the implementation of this regulation still faces various challenges, both internally and externally. The implementation of this regulation still faces various challenges, such as the availability of facilities and infrastructure, the quality of teachers, and the dynamics of the world of work that continues to change. This study concludes that the success of the transformation of vocational education is highly dependent on the commitment and synergy between the government, the business world, and the community.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu proses sistematis yang dirancang untuk mengembangkan potensi manusia melalui transfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai. Lebih dari sekadar penyampaian informasi, pendidikan berperan penting dalam membentuk karakter, membuka wawasan, dan mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan kehidupan.

Melalui interaksi antara peserta didik, pendidik, dan lingkungan belajar, pendidikan menjadi wahana untuk membangun fondasi yang kokoh bagi perkembangan pribadi, sosial, dan intelektual seseorang. Dengan memahami esensi pendidikan, kita dapat merangkai landasan yang kuat untuk menjelajahi peran dan dampaknya dalam pembentukan masyarakat dan masa depan yang lebih baik. (Atmanegara, 2024)

Dalam menghadapi tantangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat penting melakukan upaya yang serius dalam bidang pendidikan. Oleh karena pentingnya masalah pendidikan, perlu diatur regulasi dengan menggunakan aturan baku mengenai pendidikan tersebut yang dipayungi oleh sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Upaya pemerintah untuk menghadapi tantangan tersebut adalah dengan peningkatan mutu masyarakat Indonesia melalui perbaikan pendidikan. Salah satunya Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi memiliki peran penting dalam mempersiapkan individu untuk dunia kerja dan bertujuan untuk menyiapkan SDM kompeten, produktif, dan berdaya saing untuk menyiapkan dan menyongsong Indonesia Emas 2045. (Avana et al., 2023)

Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK merupakan tonggak penting dalam reformasi pendidikan vokasi di Indonesia. Peraturan ini tidak hanya sekadar mengatur standar, namun juga merefleksikan politik hukum yang lebih luas terkait pengembangan sumber daya manusia yang siap kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum yang terkandung dalam Permendikbud tersebut dan implikasinya terhadap pendidikan vokasi di Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia perlu dilakukan revitalisasi sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan melalui penyempurnaan dan penyelarasan kurikulum dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan, peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kerja sama antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha/industri, peningkatan akses sertifikasi lulusan, dan program lainnya. (Kemendikbud, 2018)

Ketentuan yang mengatur mengenai sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan sebagaimana diatur dalam beberapa Peraturan Menteri dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, dan tantangan global sehingga perlu diganti; (Kemendikbud, 2018)

Tujuan Penelitian ini Secara garis besar adalah untuk menganalisis politik hukum terhadap Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang latar belakang, isi, implikasi, dan tantangan dalam implementasi kebijakan pendidikan vokasi di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi dan mempersiapkan lulusan yang siap menghadapi dunia kerja.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 berhasil mereformasi pendidikan vokasi di Indonesia, apa saja faktor penghambat dan pendukung implementasi Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 dalam praktik, dan bagaimana implikasi politik hukum dari Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 terhadap kualitas lulusan SMK dan kesesuaiannya dengan kebutuhan dunia kerja.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau (library research) yang merupakan pendekatan kualitatif dalam mengumpulkan data melalui kajian-kajian terhadap berbagai literatur yang relevan dengan topik pendidikan dan landasannya. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji dan menganalisis konsep-konsep dasar, teori-teori, dan pandangan yang telah ada mengenai Pendidikan vokasi, serta bagaimana berbagai landasan pendidikan vokasi diterapkan dalam konteks nasional Indonesia terutama pada Sekolah Menengah Kejuruan. Literatur yang menjadi fokus kajian mencakup buku teks, jurnal akademik, dan yang lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 merupakan langkah signifikan dalam upaya mereformasi pendidikan vokasi di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan relevansi pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja, serta meningkatkan kualitas lulusan SMK/MAK. Namun, sejauh mana keberhasilan reformasi ini masih menjadi perdebatan dan memerlukan evaluasi lebih lanjut.

1 Beberapa Indikator Keberhasilan:

Peningkatan Relevansi Kurikulum: Ada indikasi bahwa kurikulum SMK/MAK telah lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja, terlihat dari adanya peningkatan kerjasama antara sekolah dengan dunia usaha dan industri. Namun, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua kompetensi yang diajarkan benar-benar dibutuhkan oleh industri.

Praktik kerja lapangan menjadi bagian yang lebih terintegrasi dalam proses pembelajaran. Hal ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di sekolah dan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang sebenarnya. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran semakin meningkat, sejalan dengan perkembangan zaman dan tuntutan dunia kerja. Terdapat tren peningkatan minat masyarakat terhadap pendidikan vokasi, meskipun masih perlu upaya lebih lanjut untuk mengubah persepsi masyarakat yang masih memandang sebelah mata terhadap lulusan SMK.

2 Tantangan dan Hambatan:

Implementasi yang Tidak Merata: Implementasi peraturan ini masih belum merata di seluruh daerah, terutama di daerah terpencil. Keterbatasan sarana dan prasarana, serta kualitas guru yang beragam menjadi kendala utama. Kualitas guru SMK masih menjadi tantangan. Tidak semua guru memiliki kompetensi yang memadai untuk mengajar sesuai dengan kurikulum yang baru. Meskipun sudah ada peningkatan kerjasama, namun belum semua SMK memiliki mitra industri yang kuat. Hal ini dapat menghambat proses link and match antara pendidikan dan dunia kerja. Dunia kerja terus berubah dengan cepat, sehingga kurikulum SMK perlu terus disesuaikan agar tetap relevan.

3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan:

Komitmen pemerintah dalam memberikan anggaran dan dukungan kebijakan sangat penting untuk keberhasilan reformasi pendidikan vokasi. Kepemimpinan kepala sekolah, komitmen guru, dan keterlibatan siswa sangat menentukan keberhasilan implementasi peraturan ini di tingkat sekolah. Kerjasama yang erat antara sekolah dengan dunia usaha dan industri akan sangat membantu dalam meningkatkan relevansi pendidikan vokasi. Dukungan masyarakat, terutama orang tua siswa, sangat penting untuk mendorong anak-anak mereka memilih pendidikan vokasi.

Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 merupakan langkah maju dalam upaya mereformasi pendidikan vokasi di Indonesia. Namun, implementasinya di lapangan tentu saja menghadapi berbagai tantangan dan dukungan. Berikut adalah beberapa faktor penghambat dan pendukung yang perlu diperhatikan:

4 Faktor Penghambat

Tidak semua guru SMK memiliki kompetensi yang memadai, terutama dalam hal penguasaan teknologi dan kemampuan mengaitkan teori dengan praktik. Beberapa guru mungkin kesulitan beradaptasi dengan perubahan kurikulum yang lebih berorientasi pada kompetensi.

Banyak SMK, terutama di daerah terpencil, masih kekurangan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pembelajaran praktik. Perawatan sarana dan prasarana yang kurang optimal juga menjadi kendala. Tidak semua SMK memiliki mitra industri yang kuat untuk mendukung kegiatan praktik kerja lapangan dan pengembangan kurikulum. Dunia usaha dan industri seringkali memiliki tuntutan yang dinamis, sehingga sulit bagi SMK untuk terus menyesuaikan kurikulum. Anggaran yang terbatas untuk sekolah seringkali menjadi kendala dalam melaksanakan program-program yang mendukung implementasi Permendikbud. Biaya sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK dapat menjadi beban bagi sekolah dan siswa.

Masih ada stigma negatif terhadap lulusan SMK yang menganggap bahwa lulusan SMK kurang berkualitas dibandingkan lulusan SMA. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dunia usaha, dan industri dapat menghambat implementasi.

5 Implikasi Politik Hukum Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 terhadap Kualitas Lulusan SMK dan Kesesuaiannya dengan Dunia Kerja

Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 merupakan sebuah upaya signifikan dalam merombak sistem pendidikan vokasi di Indonesia. Peraturan ini tidak hanya menyentuh aspek teknis pendidikan, tetapi juga memiliki implikasi politik hukum yang luas, terutama dalam konteks peningkatan kualitas lulusan SMK dan kesesuaiannya dengan kebutuhan dunia kerja.

1 Implikasi Politik Hukum:

a) Penguatan Peran Negara:

- Mandat Negara: Permendikbud ini menegaskan kembali mandat negara dalam menjamin mutu pendidikan dan kesesuaiannya dengan kebutuhan pembangunan.
- Intervensi Kebijakan: Negara memiliki peran aktif dalam mengintervensi kurikulum, standar kompetensi, serta mekanisme pengawasan.
- Kerangka Hukum yang Kuat: Adanya payung hukum yang kuat memberikan landasan bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan vokasi.

b) Peningkatan Partisipasi Publik:

- Kerjasama Dunia Usaha dan Industri: Permendikbud mendorong kerjasama yang lebih erat antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industri. Hal ini membuka ruang bagi partisipasi publik dalam menentukan arah pengembangan kurikulum dan kompetensi lulusan.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Proses penyusunan dan implementasi peraturan ini diharapkan lebih transparan dan akuntabel, sehingga melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

c) Perubahan Dinamika Kekuasaan:

- Pergeseran Kekuasaan: Permendikbud ini berpotensi mengubah dinamika kekuasaan dalam sistem pendidikan, di mana dunia usaha dan industri memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan arah pendidikan vokasi.
- Egalitarianisme Pendidikan: Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara pendidikan akademik dan vokasi, sehingga memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua siswa.

d) Dampak terhadap Kualitas Lulusan SMK:

- Peningkatan Relevansi: Kurikulum yang disusun berdasarkan kebutuhan dunia kerja diharapkan menghasilkan lulusan yang lebih siap kerja.
- Peningkatan Kompetensi: Fokus pada pengembangan kompetensi hard skills dan soft skills akan menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas.
- Peningkatan Keterampilan Praktis: Adanya praktik kerja lapangan yang terintegrasi dalam kurikulum akan meningkatkan keterampilan praktis lulusan.

e) Dampak terhadap Kesesuaian dengan Dunia Kerja:

- Link and Match: Adanya kerjasama yang erat antara sekolah dengan dunia usaha dan industri akan memperkuat link and match antara pendidikan dan dunia kerja.
- Peningkatan Daya Serap Pasar Kerja: Lulusan SMK yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja akan lebih mudah terserap di pasar kerja.
- Kontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Peningkatan kualitas lulusan SMK akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

KESIMPULAN

Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 merupakan langkah awal yang baik dalam upaya transformasi pendidikan vokasi di Indonesia. Namun, keberhasilan implementasi peraturan ini membutuhkan komitmen dan kerja sama dari semua pihak yang terkait. Dengan dukungan dan upaya yang berkelanjutan, pendidikan vokasi di Indonesia dapat menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 juga merupakan sebuah upaya signifikan dalam merombak sistem pendidikan vokasi di Indonesia. Peraturan ini tidak hanya menyentuh aspek teknis pendidikan, tetapi juga memiliki implikasi politik hukum yang luas, terutama dalam konteks peningkatan kualitas lulusan SMK dan kesesuaiannya dengan kebutuhan dunia kerja.

REFERENSI

Atmanegara, W. (2024) 'Berajah Journal THE BASIS OF EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL EDUCATION SYSTEM', *Berajah Journal*, 4(3), pp. 547–562. Available at: <https://doi.org/10.47353/bj.v4i3.345>.

- Avana, N. et al. (2023) 'Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Implementasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi', *Naturalistic: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 8(2), pp. 322–338. Available at: <https://doi.org/10.35568/naturalistic.v8i2.3559>.
- Kemendikbud (2018) 'Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan', *Jdih.Kemdikbud.Go.Id*, pp. 1–1369.